



---

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN DI  
PUSKESMAS CAMPUREJO KOTA KEDIRI**

**Rini Hidayat<sup>1</sup>, Kesi Wahyuwidarti<sup>2\*</sup>, Nofiyanti Dwi Prihantini<sup>3</sup>, Rossalia Widya  
Qadrin<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia  
official@iik-strada.ac.id\*

---

**Article History:**

Received: 22-08-2023

Revised: 02-09-2023

Accepted: 06-09-2023

**Keywords:** Fasilitas,  
Keselamatan &  
Manajemen

**Abstract:** Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif di suatu wilayah kerja puskesmas. Salah satu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan adalah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan harus mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja. Dalam penugasan residensi ini bertujuan untuk memberikan gambaran keseluruhan mengenai implementasi Manajemen Fasilitas dan Keselamatan(MFK)di Puskesmas Campurejo Kota Kediri. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan sosialisasi MFK diruang pertemuan Puskesmas Campurejo kota kediri. Yang mana dalam sosialisasi tersebut dilakukan pretes dan post tes untuk mengukur pemahaman peserta dan memberikan umpan balik dengan memberikan bantuan sarana dukung program MFK. Berdasarkan hasil post tes saat sosialisasi ,puskesmas Campurejo sudah memahami manajemen fasilitas keselamatan, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan sarpras untuk meningkatkan keselamatan baik untuk pasien maupun petugas sendiri. Dengan kondisi tersebut maka penulis ingin menerapkan strategi dalam meningkatkan implementasi manajemen fasilitas dan keselamatan di Puskesmas Campurejo Kota Kediri. Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) memperkuat standar fasilitas dan keselamatan. Budaya keselamatan dibangun melalui edukasi berkelanjutan, memastikan aktivitas aman.

---

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

---

**PENDAHULUAN**

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di setiap kecamatan di Indonesia. Fasilitas pelayanan kesehatan menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2009) pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan akan dapat berjalan dengan baik jika keberadaan fasilitas dan jaminan keselamatan terpenuhi. Manajemen fasilitas dan keselamatan di pelayanan kesehatan termasuk di

Puskesmas menjadi kunci utama penyelenggaraan upaya kesehatan. Keselamatan pasien merupakan komponen penting dalam pelayanan Kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan menurut (Pemerintah RI, 2016) adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Menurut (Kemenkes RI, 2018) salah satu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan adalah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan harus mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja.

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai (Kemenkes RI, 2019) keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan harus mencukupi. Di samping ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang cukup, kualitas lingkungan juga merupakan hal yang penting dalam pencapaian derajat kesehatan. Puskesmas yang didirikan pada setiap kecamatan harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik.

Sesuai (Kemenkes RI, 2023) Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang meliputi Manajemen sarana (bangunan), prasarana, keselamatan dan keamanan lingkungan puskesmas harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sarana (bangunan), prasarana, peralatan, keselamatan dan keamanan lingkungan dikelola dalam Manajemen Fasilitas dan Keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dikaji dengan memperhatikan manajemen resiko. Keamanan di dalam MFK dimaksudkan sebagai melindungi properti milik puskesmas, pasien, staf, keluarga, pengunjung dari bahaya kehilangan, kerusakan atau pengrusakan oleh yang tidak berwenang. Salah satu bentuk upaya melindungi tersebut adalah dengan melakukan pengelolaan keamanan dilingkungan puskesmas dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya manajemen keselamatan dan keamanan yang jelas agar seluruh orang yang berada di puskesmas merasa selamat dan aman.

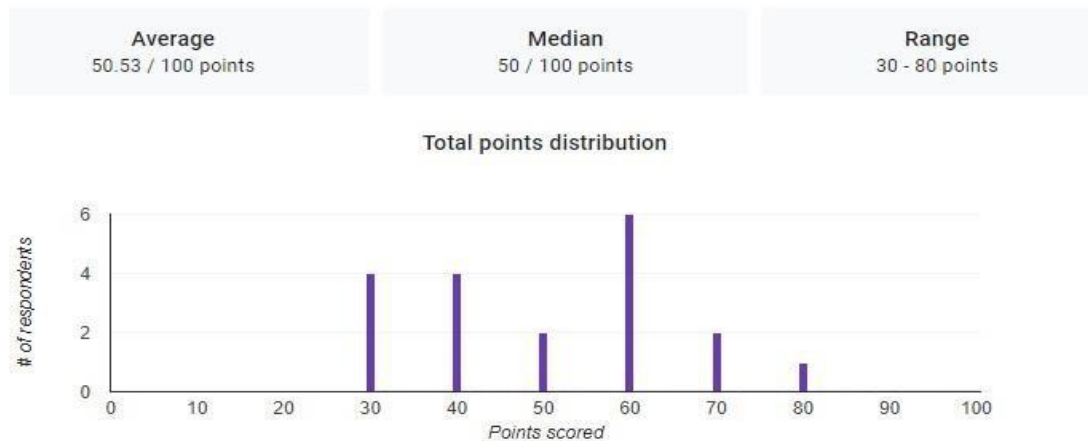
Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2009) pasal 164 menyebutkan Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan Kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Dikuatkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja menyebutkan bahwa Keselamatan dan kesehatan kerja harus ada di perusahaan atau instansi pemerintahan, karena salah satu aspek perlindungan tenaga kerja.

## **METODE PELAKSANAAN**

Dalam penugasan residensi penulis telah menulis berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari implementasi manajemen fasilitas dan keselamatan di Puskesmas Campurejo Kota Kediri. Yang mana dalam studi tersebut terdapat beberapa strategi dalam meningkatkan implementasi manajemen fasilitas dan keselamatan. Berdasarkan kondisi di atas maka penulis ingin menerapkan strategi dalam meningkatkan implementasi manajemen fasilitas dan keselamatan dengan memberikan pretes dan post tes saat pelaksanaan sosialisasi MFK di Puskesmas Campurejo Kota Kediri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

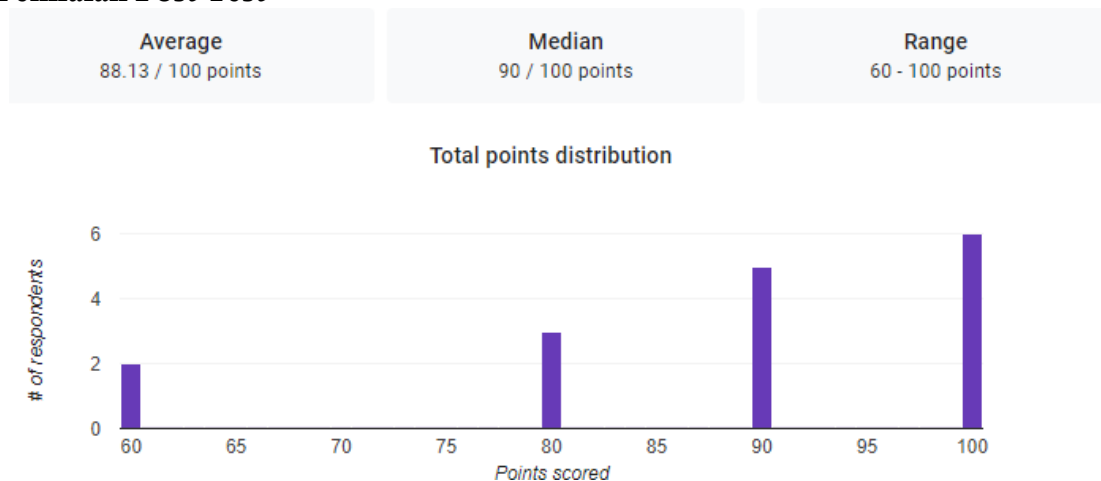
### A. Penilaian Pre Test



**Gambar 1.** Hasil Pre Test Sosialisasi MFK di Puskesmas Campurejo

Sosialisasi MFK di puskesmas Campurejo diikuti 19 Orang dari 54 orang total karyawan. Dengan hasil Pretest didapatkan adanya Nilai rata-rata 50.53 dengan nilai tertinggi 80 sebanyak 1 orang (5 % dari total responden) dan nilai terendah 30 sebanyak 3 orang (16% dari total responden).

### B. Penilaian Post Test



**Gambar 2.** Hasil Post Test Sosialisasi MFK di Puskesmas Campurejo

Sosialisasi MFK di puskesmas Campurejo diikuti 19 Orang dari 54 orang total karyawan. Dengan hasil Post test didapatkan adanya Nilai rata-rata 80.13 dengan nilai tertinggi 100 sebanyak 6 orang (31 % dari total responden) dan nilai terendah 60 sebanyak 1 orang (5 % dari total responden).

Pentingnya manajemen sarana (bangunan), prasarana, peralatan, serta keselamatan dan keamanan lingkungan di Puskesmas dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) di Puskesmas dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat. Program MFK perlu disusun dan diterapkan setiap tahun untuk menjaga kualitas dan keamanan lingkungan.

Bagian pertama membahas manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas. Fasilitas yang aman adalah yang tidak membahayakan pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat. Keamanan fasilitas berhubungan dengan melindungi dari kehilangan, pengrusakan, atau akses oleh pihak yang tidak berwenang.

Bagian kedua membahas manajemen bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3. Dalam manajemen ini, penanganan B3 harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk penetapan jenis dan area penyimpanan, pelabelan, pendokumentasian, penanganan tumpahan, dan penggunaan alat pelindung diri (APD).

Bagian ketiga membahas manajemen kedaruratan dan bencana. Manajemen ini meliputi rencana dan tanggapan terhadap berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi, termasuk identifikasi bahaya, penentuan peran puskesmas, strategi komunikasi, manajemen sumber daya, penyediaan pelayanan, identifikasi peran pegawai, serta simulasi kesiapan menghadapi bencana. Bagian keempat membahas manajemen pengamanan kebakaran, yang bertujuan melindungi properti dan penghuni dari kebakaran. Ini melibatkan langkah-langkah pencegahan kebakaran, seperti identifikasi area berisiko dan pengujian sistem proteksi secara berkala.

Bagian kelima membahas manajemen alat kesehatan, yang mengurangi risiko ketidakterersediaan dan kegagalan fungsi alat kesehatan. Alat kesehatan harus dipilih, dipelihara, dan digunakan sesuai ketentuan untuk memastikan ketersediaan dan fungsionalitasnya.

Bagian keenam membahas manajemen sistem utilitas, yang meliputi sistem listrik, air, gas medik, dan dukungan lainnya. Sistem ini harus dipelihara untuk meminimalkan risiko kegagalan operasional dan tetap tersedia secara kontinu.

Bagian terakhir menyebutkan pentingnya pendidikan MFK, yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak terkait terhadap prinsip-prinsip manajemen fasilitas dan keselamatan, serta penerapan praktik terbaik dalam lingkungan puskesmas.

Pembahasan ini menguraikan berbagai aspek yang diperlukan dalam manajemen fasilitas dan keselamatan di Puskesmas, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan lingkungan yang aman dan layanan yang berkualitas bagi semua pihak yang terlibat. Kepuasan pasien dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan mutu pelayanan sebuah fasilitas kesehatan.

Pendidikan MFK merupakan komponen yang sangat penting dalam menciptakan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip-prinsip manajemen fasilitas dan keselamatan di lingkungan Puskesmas. Melalui program pendidikan MFK, semua pihak yang terlibat, termasuk petugas layanan kesehatan, manajemen, dan staf pendukung, dapat mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami dan mengimplementasikan praktik terbaik dalam manajemen fasilitas dan keselamatan.

Pendidikan MFK dapat melibatkan pelatihan, seminar, *workshop*, dan berbagai bentuk komunikasi edukatif lainnya. Pada tahap ini, petugas dan personel akan mempelajari tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk menjaga keamanan lingkungan, merespon situasi darurat dan bencana, mengelola alat kesehatan, serta memahami aspek-aspek penting dalam sistem utilitas.

Selain memberikan pengetahuan, pendidikan MFK juga dapat membantu dalam membangun budaya keselamatan dan keamanan di lingkungan Puskesmas. Ketika semua individu memiliki pemahaman yang seragam tentang praktik-praktik yang harus diikuti untuk menjaga keselamatan dan keamanan, hal ini dapat mengurangi risiko insiden dan membantu meningkatkan kualitas pelayanan.

Perlu diingat bahwa pendidikan MFK bukanlah sekali-sekali, melainkan suatu upaya berkelanjutan. Setiap perubahan dalam peraturan atau perubahan lingkungan kerja yang mungkin terjadi harus segera diterapkan dalam program pendidikan ini. Dengan

demikian, semua pihak akan tetap *up-to-date* dengan praktik terkini dalam manajemen fasilitas dan keselamatan.

Dalam keseluruhan, pendidikan MFK adalah alat penting untuk mencapai lingkungan yang aman dan berkesinambungan di Puskesmas. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan ini, semua pihak akan mampu berkontribusi secara aktif dalam menjaga dan meningkatkan standar fasilitas dan keselamatan, sehingga memberikan dampak positif pada pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Penelitian oleh Salim dan Rahman (2020) menjelaskan pentingnya pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan dalam lingkungan layanan kesehatan. Mereka mengemukakan bahwa melalui program pendidikan yang terintegrasi dengan manajemen fasilitas, semua pihak terlibat dalam lingkungan kesehatan dapat memahami dan mengimplementasikan praktik-praktik yang diperlukan untuk menjaga keamanan pasien, petugas, dan lingkungan. Artikel ini juga menyatakan bahwa pendidikan ini harus diakses secara berkelanjutan dan mencakup perubahan peraturan atau kondisi yang mungkin terjadi dalam lingkungan kerja. Penekanan pada pendidikan yang berkelanjutan ini penting untuk memastikan bahwa pengetahuan dan praktik yang relevan selalu diterapkan dengan tepat.

Dalam buku karya Jones dan Smith (2018), penulis membahas betapa pentingnya manajemen fasilitas dan keselamatan di lingkungan layanan kesehatan. Mereka menyoroti bagaimana praktik-praktik manajemen fasilitas dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan keselamatan pasien serta petugas. Selain itu, penulis menekankan perlunya pendidikan yang berkelanjutan dalam upaya menjaga standar keselamatan dan keamanan. Buku ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif tentang bagaimana pendidikan MFK harus menjadi komponen utama dalam pengelolaan Puskesmas, memastikan bahwa semua pihak memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk merespons perubahan dan situasi darurat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Kesimpulannya, manajemen sarana (bangunan), prasarana, peralatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan di Puskesmas memiliki peran yang krusial dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman bagi masyarakat. Dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, Puskesmas mampu menciptakan lingkungan yang bebas dari risiko dan bahaya, menjaga ketersediaan dan fungsionalitas alat kesehatan, serta menghadapi berbagai situasi darurat dan bencana dengan efektif.

Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) menjadi pijakan dalam upaya menjaga dan meningkatkan standar fasilitas dan keselamatan di Puskesmas. Melalui MFK, aspek-aspek seperti manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas, pengelolaan bahan berbahaya beracun dan limbah, manajemen kedaruratan dan bencana, pengamanan kebakaran, serta manajemen alat kesehatan dan utilitas dapat terintegrasi dengan baik.

Pendidikan MFK adalah elemen krusial dalam menjembatani pemahaman dan implementasi praktik-praktik terbaik dalam manajemen fasilitas dan keselamatan. Dengan menyediakan pelatihan dan edukasi secara berkelanjutan kepada semua pihak yang terlibat, Puskesmas dapat membangun budaya keselamatan dan keamanan yang melekat dalam setiap aspek aktivitasnya.

Dengan mengintegrasikan manajemen fasilitas dan keselamatan yang efektif, Puskesmas memberikan kontribusi positif pada kualitas pelayanan kesehatan. Dalam lingkungan yang aman, terkendali, dan siap menghadapi berbagai tantangan, Puskesmas dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal, menjadikan kesejahteraan pasien, pengunjung, dan staf sebagai prioritas utama.

## B. Saran

Diharapkan petugas kesehatan memahami dengan benar terkait program manajemen fasilitas dan keselamatan yang ada di puskesmas secara rutin baik setiap bulan atau setiap minggu sekali sebaiknya dilakukan supervisi dan pemantauan penilaian keandalan dan kemampuan petugas dalam manajemen fasilitas dan agar kualitas pelayanan di puskesmas Campurejo kota Kediri dapat berkesinambungan dan meningkatkan kepuasan pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ulumiyah, N.H. (2018). Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan penerapan upaya keselamatan pasien di puskesmas. *Jurnal administrasi Kesehatan*. 6(2), 150. doi 10.20473/jaki.v6i2.2018.149-155.
- [2] Ferial, L., & Nova, W. (2022). Mutu pelayanan kesehatan meningkat dengan menerapkan keselamatan pasien di puskesmas. *Jurnal JOUBAHS*. 2(1), 39.
- [3] Suranto, D., Chriswardani, S., & Yuliani, S. (2020). Analisis budaya keselamatan pasien pada berbagai tenaga kesehatan di RSUD dr. Soediran mangun sumarso Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 8(1), 49.
- [4] Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5768/pp-no-47-tahun-2016>
- [5] Peraturan Pemerintah No.88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128642/pp-no-88-tahun-2019>
- [6] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. <https://www.kemhan.go.id/itjen/2017/03/13/peraturan-menteri-kesehatan-republik-indonesia-nomor-11-tahun-2017-tentang-keselamatan-pasien.html> Peraturan Menteri Kesehatan No.27
- [7] Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112075/permenkes-no-27-tahun-2017>
- [8] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.54 Tahun 2015 tentang Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/107180/Permenkes%20Nomor%2054%20Tahun%202015.pdf>